

## PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN DEMOGRAFI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

M.MUNAWIR HAFIZ<sup>1)\*</sup>, IWAN HARSONO<sup>2)</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram

<sup>1)</sup>[munawirhafiz15@gmail.com](mailto:munawirhafiz15@gmail.com) (corresponding), <sup>2)</sup>[iwanharsono@unram.ac.id](mailto:iwanharsono@unram.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah selama 10 tahun atau 120 bulan periode tahun anggaran 2013 sampai tahun 2022, penelitian ini menguji dampak pajak daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier berganda, asumsi klasik, uji T, dan uji F. Berdasarkan hasil regresi, nilai t-statistik untuk pajak daerah dengan nilai prob  $0.0001 < 0.05$ , disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil lain-lain PAD yang sah memiliki nilai prob  $0.0004 < 0.05$ , disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD. selanjutnya dana perimbangan memiliki nilai prob  $0.0820 > 0.05$ , di simpulkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan untuk jumlah penduduk memiliki nilai prob  $0.0449 < 0.05$  yang artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; Dana Perimbangan; Jumlah Penduduk; Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional taxes, other legitimate regional revenues, balancing funds, and population size on the Locally-Generated Revenue (PAD) of West Nusa Tenggara Province. Using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and local governments over a period of 10 years or 120 months, covering the fiscal years from 2013 to 2022, this study examines the impact of regional taxes, other legitimate regional revenues, balancing funds, and population size on PAD. The method used in this study includes multiple linear regression, classical assumption tests, t-tests, and F-tests. Based on the regression results, the t-statistic value for regional taxes with a probability value of  $0.0001 < 0.05$  indicates that regional taxes have a significant effect on PAD. The probability value for other legitimate regional revenues is  $0.0004 < 0.05$ , leading to the conclusion that other legitimate regional revenues also significantly affect PAD. Meanwhile, the balancing funds have a probability value of  $0.0820 > 0.05$ , suggesting that they do not affect PAD. Lastly, the population size has a probability value of  $0.0449 < 0.05$ , meaning that population size significantly influences PAD.

**Keywords:** Regional Taxes; Other Legitimate Regional Income; Balancing Funds; Population; Original Regional Income

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, yang sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Pada tingkat daerah, pajak daerah merupakan kewajiban yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pemungutan ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan pembangunan di tingkat lokal, serta mendukung kemandirian daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya secara otonom demi tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah (Ardiyanti et al., 2022).

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, banyak daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sering bergantung pada bantuan dari pemerintah

pusat. Untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber yang ada dan eksplorasi potensi baru. PAD diharapkan menjadi sumber utama dalam pembiayaan kebutuhan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan antara daerah dan pusat (Natoen et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan mengatur dana perimbangan sebagai bentuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah serta antara pemerintah pusat dan daerah yang berfungsi untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, serta memperbaiki layanan public (Febrianti, 2022).

Peningkatan jumlah penduduk memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, karena mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan produksi serta munculnya usaha-usaha baru, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk mendukung peningkatan PAD. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan yang tepat melalui kebijakan yang baik (Rahman & Restiatun, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan daerah dalam mengelola APBD menggambarkan langkah nyata mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Sumber pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan sumber lainnya, sementara pengeluaran mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi anggaran ini mencerminkan kebijakan fiskal daerah selama tahun anggaran berjalan. (BPS NTB, 2022).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui penyediaan layanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari retribusi, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber-sumber sah lainnya. Pungutan pajak daerah bertujuan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat (Wijoyo et al., 2019).

Menurut (Lafera, 2020) Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan, khususnya PAD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. PAD diperoleh dari pajak, retribusi daerah, serta sumber-sumber sah lainnya. Melalui UU Otonomi Daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi dan kemنديannya dengan mengelola pajak dan retribusi yang menjadi wewenangny, guna meningkatkan PAD secara efektif.

PAD merupakan faktor penting dalam mencapai kemandirian finansial daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin mandiri suatu daerah dan semakin sedikit ketergantungannya pada bantuan pemerintah pusat (Zahra et al., 2022). Pemungutan pajak daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pemungutan yang efektif, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat. Keberhasilan dalam memungut pajak ini akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan dan memperkuat kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakatnya (Barus et al., 2024).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh perorangan maupun badan usaha kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pemungutan pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan manfaat langsung secara proporsional kepada pembayar. Secara hukum, pajak merupakan kewajiban yang sah berdasarkan undang-undang. Dari perspektif ekonomi, pajak berfungsi untuk mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, sehingga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang dan layanan publik. Di sisi lain, pajak mengurangi kemampuan individu atau perusahaan dalam menguasai sumber daya secara langsung, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Harefa & Tampubolon, 2021).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai potensi yang dimiliki setiap daerah. Sumber pendapatan ini beragam dan sangat bergantung pada karakteristik dan kekayaan yang ada di masing-masing wilayah. Variasi potensi ini memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan tambahan sesuai dengan keunggulan dan peluang ekonomi lokalnya (Hafandi & Romandhon, 2020).

Dana perimbangan adalah sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun dana ini dirancang untuk membantu daerah, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana perimbangan dapat melemahkan inisiatif daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Akibatnya, hal ini bisa berdampak pada menurunnya

kemandirian finansial serta kinerja keuangan daerah secara keseluruhan (Nugroho et al., 2023). Tujuan utama dana ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem perimbangan keuangan dirancang agar pembagian dana berlangsung secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah. (UU No. 33/2004).

Penduduk memainkan peran sentral dalam pembangunan sebagai subjek dan objek. Keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana kesejahteraan penduduk meningkat, baik secara fisik maupun non-fisik. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi jika disertai dengan kualitas yang memadai. Namun, jika kualitas penduduk rendah, jumlah yang besar justru berpotensi menjadi beban bagi pembangunan nasional (Jumadi & Hayati, 2022).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

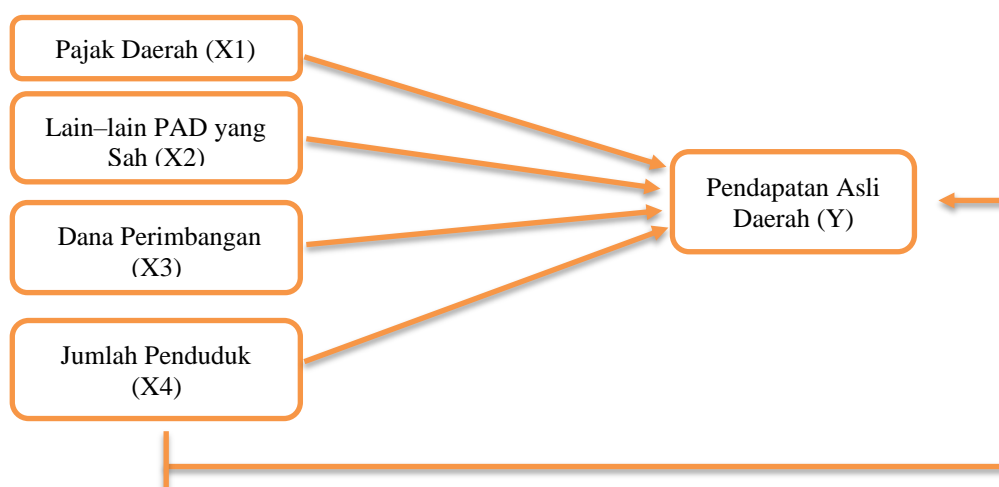
1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap PAD?
3. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap PAD?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD?
5. Manakah dari keempat variabel tersebut yang memiliki pengaruh dominan terhadap PAD?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menguji pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap PAD.
3. Menilai apakah dana perimbangan berkontribusi terhadap PAD.
4. Mengkaji pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
5. Menentukan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD.
- 6.

### Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Analisis yang digunakan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis data dalam bentuk angka guna menguji hubungan antara variabel-variabel yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber sebelumnya atau sumber lain yang relevan, termasuk laporan, jurnal, dan dokumen resmi. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat dalam mendukung analisis yang dilakukan.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) untuk periode tahun 2013-2022 sebagai data utama. Dokumen-dokumen yang dianalisis,

termasuk laporan keuangan pemerintah daerah dan statistik keuangan provinsi, berfungsi sebagai dasar yang mendukung temuan penelitian.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa uji T, uji F, regresi linier berganda, serta pengujian terhadap asumsi klasik. Dengan persamaan model analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana

Y = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X1)

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel lain-lain PAD yang sah (X2)

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X3)

$\beta_4$  = Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (X4)

X1 = Variabel Pajak Daerah

X2 = Variabel lain-lain PAD yang sah

X3 = Variabel dana perimbangan

X4 = Variabel jumlah Penduduk

$\mu$  = Error term (standar error)

### Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y), yang diukur berdasarkan indikator Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 hingga 2022. Sementara itu, variabel independen terdiri dari beberapa komponen, yaitu penerimaan Pajak Daerah (X1), pendapatan daerah lainnya yang sah (X2), dana perimbangan (X3), serta jumlah penduduk (X4). Indikator yang digunakan untuk variabel independen juga mengacu pada Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu yang sama, yaitu 2013 hingga 2022. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, pendapatan lain yang sah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu 2013 hingga 2022.

### Hasil Regresi Linier Sederhana

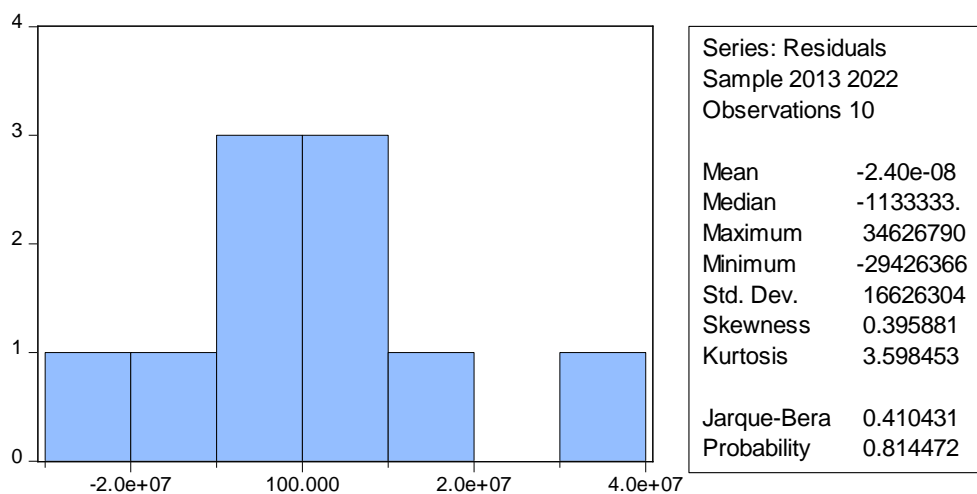
**Tabel 1. Hasil Regresi Linier Sederhana**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.08E+09	3.65E+08	2.966838	0.0313
X1	1.109912	0.104807	10.59008	0.0001
X2	1.085979	0.130775	8.304157	0.0004
X3	0.027993	0.012890	2.171623	0.0820
X4	-242.7367	91.27573	-2.659378	0.0449
R-squared	0.998302	Mean dependent var		1.55E+09
Adjusted R-squared	0.996943	S.D. dependent var		4.03E+08
S.E. of regression	22306527	Akaike info criterion		36.98551
Sum squared resid	2.49E+15	Schwarz criterion		37.13680
Log likelihood	-179.9275	Hannan-Quinn criter.		36.81954
F-statistic	734.7062	Durbin-Watson stat		3.299127
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

Dapat dilihat nilai prob jarque-bera sebesar  $0.814472 > 0.05$  alpha 5%, disimpulkan bahwa data yang digunakan lolos uji asumsi klasik atau data terdistribusi normal

### 2. Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.33E+17	2678.617	NA
X1	0.010984	327.2083	17.15723
X2	0.017102	30.43102	4.621608
X3	0.000166	25.69182	2.766600
X4	8331.258	4257.946	11.70025

Dapat dilihat dari nilai centered VIF hanya nilai Centered VIF variabel X2 dan X3 yang nilainya  $< 10.00$ . sedangkan nilai centered VIF variable X1 dan X4 nilainya  $> 10.00$

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.632849	Prob. F(4,5)	0.1585
Obs*R-squared	6.780714	Prob. Chi-Square(4)	0.1479
Scaled explained SS	2.202421	Prob. Chi-Square(4)	0.6986

Dapat dilihat dari prob chi-square sebesar  $0.1479 > 0.05$  alpha 5%, disimpulkan bahwa data yang digunakan lolos uji heteroskedastisitas

### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	8.390014	Prob. F(2,3)	0.0591
Obs*R-squared	8.483319	Prob. Chi-Square(2)	0.0144

Dapat dilihat nilai prob chi-square sebesar  $0.0144 < 0.05$  (alpha 5%) sehingga data yang digunakan terbebas dari uji autokorelasi

## Uji parsial (T)

Tabel 5. Hasil Uji parsial (T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.08E+09	3.65E+08	2.966838	0.0313
X1	1.109912	0.104807	10.59008	0.0001
X2	1.085979	0.130775	8.304157	0.0004
X3	0.027993	0.012890	2.171623	0.0820
X4	-242.7367	91.27573	-2.659378	0.0449
R-squared	0.998302	Mean dependent var		1.55E+09
Adjusted R-squared	0.996943	S.D. dependent var		4.03E+08
S.E. of regression	22306527	Akaike info criterion		36.98551
Sum squared resid	2.49E+15	Schwarz criterion		37.13680
Log likelihood	-179.9275	Hannan-Quinn criter.		36.81954
F-statistic	734.7062	Durbin-Watson stat		3.299127
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi diatas nilai t-statistik untuk pajak daerah adalah 10.59008 dengan nilai prob 0.0001 < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.Selain itu, hasil untuk pendapatan lain yang sah menunjukkan nilai t-statistik sebesar 8.304157 dengan nilai prob 0.0004 < 0.05. disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD.selanjutnya dana perimbangan memiliki nilai t-statistik sebesar 2.171623 dengan nilai prob 0.0820 > 0.05 di simpulkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan untuk jumlah penduduk memiliki nilai t-statistik -2.659378 dengan nilai prob 0.0449 < 0.05 yang artinya jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD.

## Uji simultan (uji F)

Terbukti dari temuan regresi bahwa nilai F statistika dengan nilai prob 734.7062 dan memperoleh nilai statistik F 0,000 < 0.05 ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menentukan tingkat PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif terhadap semua faktor ini sangat penting untuk meningkatkan PAD, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

## Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Analisis menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Pajak daerah digunakan untuk mendanai proyek pembangunan dan kegiatan operasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pajak daerah secara langsung berdampak pada peningkatan PAD, yang selanjutnya mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Ini menegaskan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang efektif untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Mahasarani et al., 2024).Data menunjukkan pajak daerah adalah sumber PAD. Peningkatan pajak daerah akan berdampak langsung pada peningkatan PAD secara keseluruhan

### Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap PAD

Lain-lain pendapatan yang sah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Sumber pendapatan ini meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana bantuan, dan hibah, yang membantu mengurangi ketergantungan pada pajak dan retribusi. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung proyek-proyek pembangunan yang berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

### Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PAD

Dana perimbangan berperan penting dalam meningkatkan PAD dengan menyediakan sumber pendapatan tambahan, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun memberikan berbagai manfaat, pemerintah daerah perlu menjaga agar tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dan mengelolanya secara efektif untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian data menunjukkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap PAD.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD**

Populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa, mendorong pengembangan usaha, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat memperluas basis pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan PAD. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, serta memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan.

### **Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Dana Perimbangan Dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD**

Pajak daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan PAD. Pajak daerah dan lain-lain pendapatan menyediakan sumber pendapatan langsung, sementara dana perimbangan memberikan dukungan tambahan untuk pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk juga berkontribusi pada meningkatnya permintaan barang dan jasa, yang berdampak positif pada penerimaan pajak. Kombinasi keempat faktor ini dapat meningkatkan stabilitas dan kemandirian fiskal daerah, serta mendukung berbagai proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pajak daerah menjadi sumber stabil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kontribusi positif yang bisa dioptimalkan melalui kebijakan perpajakan yang efektif. Sementara itu, lain-lain pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang bervariasi sesuai potensi kekayaan tiap daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat membantu menyeimbangkan kemampuan finansial daerah yang potensinya terbatas, sehingga pembangunan tetap berjalan merata. Jumlah penduduk juga berperan dalam meningkatkan PAD, asalkan disertai kebijakan dan infrastruktur yang memadai.

### **Saran**

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan pajak, mengelola pendapatan daerah dengan lebih transparan, dan tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap PAD bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong sektor ekonomi lokal. Dengan strategi yang tepat, daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Br Barus, A. A., Elfrida Purba, E., Lubis, P. K. D., & I Manjo, F. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1113>
- Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4). <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Dety Lafera. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1). <https://doi.org/10.54783/jser.v2i1.16>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

- Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.27804>
- Jumadi, A., & Hayati, J. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di D.I. Yogyakarta Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.14504>
- Lita Febrianti. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1992>
- Mahasarani, D., Yasin, M., Wafik, A. Z., Kunci, K., Daerah, P., Pengelolaan, H., Daerah, K., Dipisahkan, Y., & Daerah, P. A. (2024). Dampak Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Ntb. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 6, Issue 2).
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1).
- Nugroho, A., Yuliusman, Y., & Hernando, R. (2023). The Influence of Regional Original Income and Balancing Funds on The Financial Performance of District/City Governments in Jambi Province in 2018-2021. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.24128>
- Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2370>
- Wage Suratman, Elyanti Rosmanidar, & Yuliana Safitri. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1132>
- Wijoyo, H. S., Djunaidi, & Astutik, P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri (Studi Kasus Di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018). *JIMEK: Jurnal Ilmiah ...*, 2.